



Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Feri Irawan¹, Ratih Kusumastuti², Gandy Wahyu Maulana Zulma³

^{1,2,3}Universitas Jambi

¹aakferry32@gmail.com, ²ratihkusumastuti@unja.ac.id, ³maulanagandi25@unja.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Juni 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 September 2022

Kata kunci:

Pengelolaan alokasi dana desa; Transparansi; Akuntabilitas; Pemberdayaan masyarakat; Perangkat desa

Keywords :

Management of village fund allocations; Transparency; Accountability; Community empowerment; Village apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh untuk seluruh perangkat desa Siau dalam yang berjumlah 100 orang. Hasil pengujian yaitu bahwa pengelolaan alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil menunjukkan bahwa setiap kenaikan alokasi dana desa sebesar satu satuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat akan naik sebesar 0,067, setiap kenaikan transparansi sebesar satu satuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat akan naik sebesar 0,064, serta setiap kenaikan akuntabilitas sebesar satu kesatuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat akan naik sebesar 0,192.

ABSTRACT

This study aims to examine how the influence of Village Fund Allocation Management, Transparency and Accountability on Community Empowerment in Siau Dalam Village, Muara Sabak Timur District, Tanjung Jabung Timur Regency. This research is a descriptive study using a quantitative approach. This study uses a saturated sample for all Siau Dalam village apparatus, totaling 100 people. The results of the test are that the management of village fund allocation, transparency and accountability have an effect on community empowerment in Siau Dalam village, Muara Sabak Timur District, Tanjung Jabung Timur Regency. The results show that for every increase in the allocation of village funds by one unit, the community empowerment variable increases by 0.067, for every increase in transparency by one unit, the community empowerment variable increases by 0.064, and for every increase in accountability by one unit, the community empowerment variable increases. of 0.192.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Saat ini, Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No.2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui desa yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (Dewi & Gayatri, 2019).

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Untuk setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, warga negara mempunyai hak untuk mengetahuinya (*right to know*). Warga negara diharapkan dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dengan dilaksanakannya transparansi. Selain itu, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal itu juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Luju et al., 2020).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sari & Mildawati, 2018)

Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi akan mengakibatkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran disuatu negara atau desa. Semakin besar jumlah pengangguran maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara atau desa tersebut (Rahayu, 2017). Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu, menciptakan suasana nyaman kepada seluruh masyarakat (Fathony & Sopian, 2019; Habib, 2021)

Tingkat kesejahteraan yang belum terpenuhi menyebabkan ketertinggalan, kemiskinan, keterpurukan ekonomi yang terjadi secara terus menerus. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat perekonomian rakyat. Strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yaitu dengan cara pemerataan pengalokasian pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan program-program guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak (Kede, 2019; Sunu & Utama, 2019). Adapun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya dengan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan (Permatasari et al., 2021). Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Handayani & Badrudin, 2019). Peningkatan terhadap pemerataan pembangunan yang memadai beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja dari masyarakat khususnya tempat pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Mendrofa, 2021). Dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di daerah pedesaan dengan alasan di pedesaan memiliki jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (Fathony & Sopian, 2019).

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah untuk pemberdayaan masyarakat di desa ini agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan yang meliputi 73 desa dan 20 kelurahan, jumlah penduduknya sebesar 222.834 jiwa dengan luas wilayahnya 5.445,00 km², dan sebaran penduduk 41 jiwa/km². Desa Siau Dalam merupakan salah

satu desa dari 10 desa yang ada di kecamatan Muara Sabak Timur, yang terdiri dari 24 RT yang memiliki 4 dusun yang dalam penyelenggaraan pemerintahnya terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa masih perlu di evaluasi kembali sehingga dapat dijadikan pedoman peningkatan pemberdayaan masyarakat. Berikut rincian realisasi anggaran di desa Siau Dalam tahun 2021 :

Tabel 1 Data Realisasi ADD Tahun 2021

Keterangan	Realisasi
Pendapatan	
Alokasi Dana Desa	Rp. 960.501.000,00
Belanja Kegiatan ADD	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 14.644.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 835.565.949,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 31.840.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.510.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 43.200.000,00
Jumlah Belanja ADD	Rp. 930.759.949
Sisa Lebih ADD	Rp. 29.741.051

Sumber : Data Diolah,2021

Dari data di atas dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula dalam Permendagri No.37 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa seharusnya setiap desa menggunakan ADD untuk belanja aparatur operasional desa sebesar 30% serta untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total penerimaan ADD. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan ADD desa Siau Dalam belum fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 5.510.000,00 itupun yang untuk pemberdayaan masyarakat Rp. 1.650.000,00 saja sedangkan sisanya Rp. 3.860.000,00 digunakan untuk perkebunan yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat lebih banyak tetapi malah sebaliknya sehingga masyarakat di desa Siau Dalam belum sejahtera sampai saat ini karena pemberdayaan masyarakatnya belum optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sari & Mildawati (2018), meneliti tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus desa Kletek kabupaten Sidoarjo). Berdasarkan hasil analisis bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang disusun secara rinci dan dapat di pertanggungjawabkan. Transparansi juga telah dilakukan dengan adanya bukti banner yang terpasang pada halaman depan kantor kelurahan. Kebijakan desa cukup baik dengan membuat kebijakan yang memprioritaskan pembangunan daerah dan kemudian dilaksanakan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangen, Pesiwarissa, & Palimbu (2019) yang berjudul Pengaruh alokasi dana desa (studi kasus) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu memberdayakan waga masyarakat dalam urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi meskipun indikator kesehatan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan membahas tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Di desa Siau Dalam harus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik agar bisa mencegah penyalagunaan kekuasaan yang ada di desa Siau Dalam dan pengelolaan dana desa Siau Dalam

harus menggunakan sistem transparansi agar bisa dipertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta untuk kebijakan desa lebih ditingkatkan lagi agar pemberdayaan masyarakat di desa Siau Dalam kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa berjalan lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat disana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa Siau Dalam terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala sesi 2 orang, kepala urusan 2 orang, kepala staf keuangan 1 orang, kepala dusun 5 orang, ketua RT 17 orang, ketua lembaga adat 1 orang, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) 15 orang, tokoh masyarakat 30 orang, karang taruna 20 orang, dan badan permusyawaratan desa (BPD) 5 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode sensus atau sampel jenuh, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh populasi sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang dari desa Siau Dalam. Objek penelitian yang diteliti adalah pengelolaan alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelusuran data primer yang didapat dari kuesioner dan wawancara.

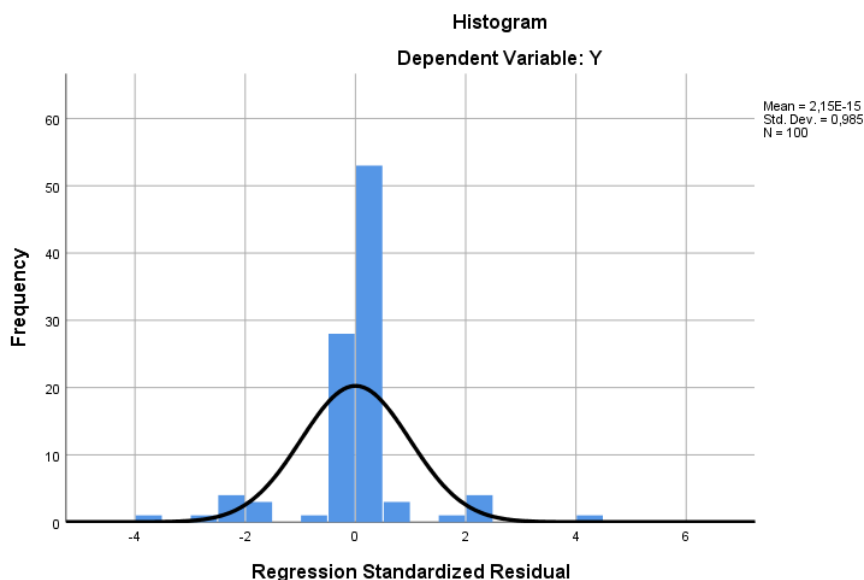
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Kuesioner penelitian dikatakan valid apabila item pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur dari keusioner tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian (Ghozali, 2018). Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya item kuesioner menggunakan nilai rTabel. Dalam penelitian ini rTabel untuk jumlah data atau responden sebanyak 100 orang dengan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 0,1966. Jika $r_{Hitung} > r_{Tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Reliabilitas merupakan syarat kedua untuk memastikan instrumen penelitian apakah bisa digunakan atau tidak. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner bisa diandalkan untuk mendapat respon dari responden. Suatu data dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 (Sujarweni, 2014). Uji reliabilitas dilakukan untuk item pertanyaan yang sudah dinyatakan valid.

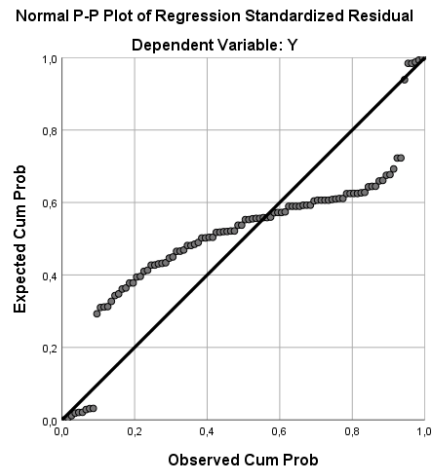
Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Grafik Histogram

Gambar 1 menunjukkan hasil histogram sudah mendekati berbentuk lonceng sehingga dikatakan sudah berdistribusi normal.



Gambar 2 Grafik P-Plot

Gambar 2 terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2 Uji Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,44234207
Most Extreme Differences	Absolute	,231
	Positive	,231
	Negative	-,207
Test Statistic		,231
Asymp. Sig. (2-tailed)		,060 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 2 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal, karena diketahui nilainya 0,06 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

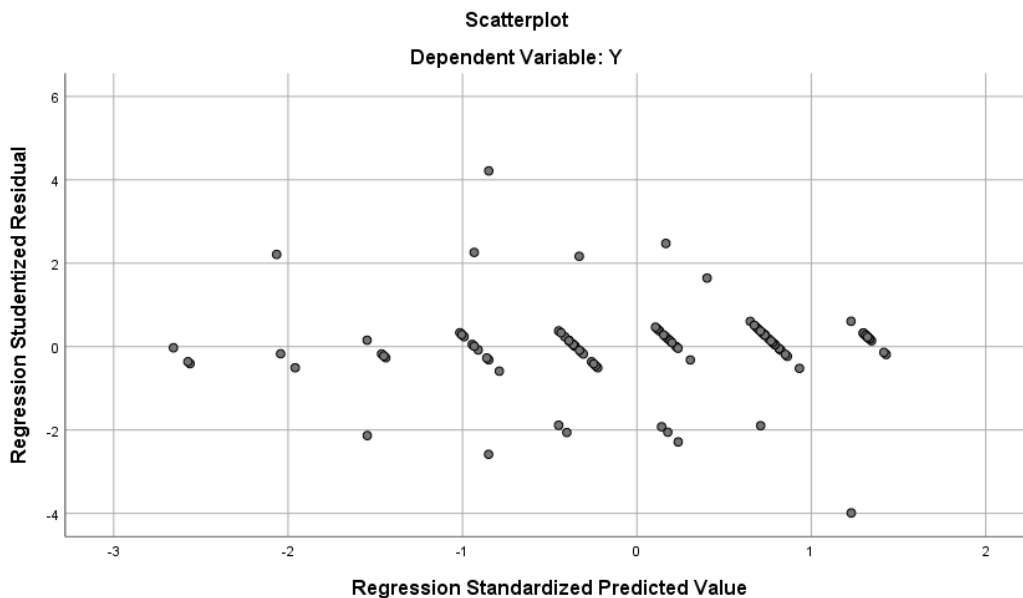
		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3,001	1,418		2,117	,037		
	X1	,020	,026	,021	,764	,447	,866	1,155
	X2	-,061	,025	-,066	-2,455	,016	,886	1,129
	X3	,960	,026	,959	37,142	,000	,958	1,044

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai VIF variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 adalah $1,155 < 10$ dan Nilai Tolerance Value $0,886 > 0,1$, X2 $1,129 < 10$ dan Nilai Tolerance Value $> 0,1$ dan X3 $1,044 < 10$ dan Nilai Tolerance Value $> 0,1$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah varians pengamatan bersifat homoskedastisitas.



Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 menunjukkan hasil bahwa titik-titiknya menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini juga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4 Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,867	,796		6,112	,000
	X1	,067	,087	,077	,767	,445
	X2	,064	,101	,067	,635	,527
	X3	,192	,135	,149	1,418	,159

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 4 menunjukkan persamaan regresi menggunakan Unstandardized Coefficients dimana koefisien konstanta sebesar 4,867. Sedangkan variabel Pengelolaan ADD sebesar 0,067, Transparansi sebesar 0,064 dan Akuntabilitas sebesar 0,192.

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 4,867 menunjukkan bahwa jika variabel bebas pengaruh Pengelolaan ADD, Transparansi, Akuntabilitas memiliki nilai 1, maka nilai variabel terikatnya dalam hal ini Pemberdayaan Masyarakat sebesar 4,867.
- Variabel Pengelolaan ADD (X1) memiliki nilai koefisien 0,067 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ADD sebesar satu satuan, maka variabel Pemberdayaan Masyarakat akan naik sebesar 0,067.
- Variabel Transparansi (X2) memiliki nilai koefisien 0,064 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Transparansi sebesar satu satuan, maka variabel Pemberdayaan Masyarakat akan naik sebesar 0,064.
- Variabel Akuntabilitas (X3) memiliki nilai koefisien 0,192. yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas sebesar satu satuan, maka variabel Pemberdayaan Masyarakat akan naik sebesar 0,192.

Pembahasan

Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t tabel untuk tingkat signifikan 5% dengan responden 100 orang yaitu sebesar 0,1986. Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ 0,767 > 0,1986 sehingga penelitian ini diterima.

Transparansi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t tabel untuk tingkat signifikan 5% dengan responden 100 orang yaitu sebesar 0,1986. Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ 0,635 > 0,1986 sehingga penelitian ini diterima.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t tabel untuk tingkat signifikan 5% dengan responden 100 orang yaitu sebesar 0,1986. Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan ADD mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,418 > 0,1986 sehingga penelitian ini diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 100 sampel penelitian di desa Siau Dalam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan alokasi dana desa, Transparansi, serta Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa siau dalam karena t hitung lebih besar sehingga penelitian ini diterima. Pengelolaan alokasi dana desa juga memiliki nilai konstanta sebesar 4,867 yang menunjukkan bahwa jika variabel bebas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa memiliki nilai 1, maka nilai variabel terikatnya dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 4,867 dan nilai koefisien 0,067 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan alokasi dana desa sebesar satu satuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat naik sebesar 0,067. Transparansi juga memiliki nilai konstanta sebesar 4,867 yang menunjukkan bahwa jika variabel bebas berpengaruh terhadap transparansi memiliki nilai 1, maka nilai variabel terikatnya dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 4,867 dan nilai koefisien 0,064 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan transparansi sebesar satu satuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat akan naik sebesar 0,064. Akuntabilitas juga memiliki nilai konstanta sebesar 4,867 yang menunjukkan bahwa jika variabel bebas berpengaruh terhadap akuntabilitas memiliki nilai 1, maka nilai variabel terikatnya dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 4,867 dan nilai koefisien 0,192 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas sebesar satu kesatuan, maka variabel pemberdayaan masyarakat akan naik sebesar 0,192.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba, & Gayatri, Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298.
- Fathony, Aditya Acmad, & Sopian, Asep. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10(ISSN : 2086-4159).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134.
- Handayani, Anik Puji, & Badrudin, Rudy. (2019). Evaluation of village fund allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283–295.
- Kede, Elisabeth Ero Raja. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 333–337.
- Kumalasari, Deti, & Riharjo, Ikhsan Budi. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Luju, Elisabet, Virgula, Imelda, Wulandari, Cicilia Ayu, & Poin, Emanuel Anjelo. (2020). *Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka*. 7(1), 37–55.
- Mangen, Rudi, Pesiwarissa, Eduard Lodewyk, & Palimbu, Lamba Toding. (2019). Pengaruh alokasi dana desa (studi kasus) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire. *FOKUS Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 92–104.

- Mendrofa, Syah Abadi. (2021). Dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Hiliwa'ele li Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 1036–1047.
- Permatasari, Paulina, Ilman, Assyifa Szami, Tilt, Carol Ann, Lestari, Dian, Islam, Saiful, Tenrini, Rita Helbra, Rahman, Arif Budi, Samosir, Agunan Paulus, & Wardhana, Irwanda Wisnu. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294.
- Rahayu, Depi. (2017). Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.
- Sari, Mandy Tania, & Mildawati, Titik. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. e-ISSN:2460-0585.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metodologi penelitian. In *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*.
- Sunu, Made Krisna Kalpika, & Utama, Made Suyana. (2019). Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843–872.